

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian serupa dilakukan Kristian Fajar Zai yang menulis skripsi dengan judul *“Perubahan Politik Luar Negeri Uni Emirat Arab Terhadap Israel : Analisis Pembukaan Hubungan Diplomatik. 2021*⁸ Di program Studi Hubungan Internasional, Universitas Jayabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan Politik Luar Negeri dengan konsep pembukaan hubungan diplomatik dan kepentingan nasional. Melalui konsep itu bisa dilihat bahwa politik luar negeri suatu negara bersifat dinamis bisa saja berganti dengan faktor kebijakan internal seperti sosial, ekonomi dan keamanan internal suatu negara. Dimana bahwa negara pada dasarnya saling bergantung dengan negara lain terlebih di era hubungan internasional sekarang yang sifatnya kontemporer. Membuat adanya ketergantungan satu sama lain adalah alasan untuk membangun relasi baru untuk memenuhi kepentingan nasional mereka. Perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis terletak pada fokus pembahasan yang akan dibahas di dalam penelitian ini. Penelitian ini akan fokus dalam membahas Kepentingan nasional Uni Emirat Arab melakukan Hubungan Diplomatik dengan Israel.

Penelitian serupa juga dilakukan Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono dalam artikelnya yang dimuat dalam laman Universitas Gadjah Mada dengan judul *“ Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel : Kepentingan Nasional Versus Solidaritas Negara Muslim terhadap Palestina”*⁹. Penelitian ini menggunakan Teori Realisme yang mengarah kepada konsep kepentingan nasional. Subtansi dalam artikel ini bagaimana respon dari negara-negara muslim lainnya terkait adanya normalisasi dan juga kepentingan. Perbedaan dengan artikel ini,

⁸ Kristian Fajar Zai, (2021). *Perubahan Politik Luar Negeri Uni Emirat Arab Terhadap Israel: Analisis Pembukaan Hubungan Diplomatik*. Skripsi. Universitas Jayabaya

⁹ Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono. (2021). *Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel: Kepentingan Nasional Versus Solidaritas Negara Muslim terhadap Palestina*. Jurnal ICMES Vol 4, Nomor 2, 2020,

Peneliti meneliti bagaimana kepentingan nasional Uni Emirat Arab dengan melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.

Penelitian serupa juga dilakukan Muhammad Alief Anshary dalam skripsinya dengan judul “ *Peran Amerika Serikat terhadap normalisasi hubungan diplomatik Israel dengan negara-negara Timur Tengah*”¹⁰. Di program studi hubungan internasional, Universitas Hasanuddin. Penelitian ini menggunakan konsep normalisasi dan konsep hubungan diplomatik. Subtansi pada skripsi ini menerangkan bagaimana peran US dalam relasinya kepada dua negara. Amerika Serikat memanfaatkan dinamika kawasan Timur Tengah dengan menggunakan triangular diplomacy untuk menghubungkan Israel dengan negara-negara Timur Tengah. Hal ini tercermin dari upaya AS untuk menyeimbangkan minat dengan penawaran dari negara-negara Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain. Akibatnya, kedua negara secara resmi menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel melalui Abraham Accords pada tahun 2020. Perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis terletak pada fokus pembahasan yang akan dibahas di dalam penelitian ini. Penelitian ini akan fokus dalam membahas Kepentingan nasional Uni Emirat Arab melakukan Hubungan Diplomatik dengan Israel.

A. Landasan Konsep dan Teori

1. Politik Luar Negeri

Politik luar negeri adalah “Action Theory” atau yang disebut dengan foreign policy yang diartikan sebagai kebijakan luar negeri yaitu strategi suatu negara untuk mencapai sesuatu kepada negara lain yang dimaksudkan dengan kepentingan tertentu. Pada dasarnya “Foreign Policy” adalah suatu mekanisme negara yang bisa menentukan nilai, sikap, arah untuk sebisa mungkin mempertahankan, mengamankan, dan mendorong kepentingan nasional dalam konstelasi politik internasional. Menurut John Morghentau

¹⁰ Muhammad Alief Anshary, (2021). Peran Amerika Serikat terhadap normalisasi hubungan diplomatik Israel dengan negara-negara Timur Tengah. Skripsi. Universitas Hassanuddin.

Politik Internasional adalah cara melihat negara tentang kekuasaan, mereka (Negara) berjuang untuk mendapatkan legitimasi. Legitimasi dalam hal ini adalah kekuasaan yang diartikan sebagai kekuatan politik, ekonomi, dan militer. Disini lain menurut Joshua Goldstein pengertian politik adalah implementasi dari kebijakan politik luar negeri dalam mengatur strategi-strategi yang dijalani oleh pemerintah dalam menentukan langkah mereka dalam dunia internasional. Sedangkan menurut Rossenau, capaian dari hasil perubahan politik luar negeri adalah untuk melihat fungsi dari proses dimana maksud arah negara menyusun tujuan yang dipengaruhi faktor masalah sebagai aspirasi bagaimana langkah untuk menjenjang di masa yang mendatang.

Pada konteks hubungan internasional politik luar negeri adalah suatu studi yang kompleks karena di dalamnya tidak hanya melibatkan peran eksternal dalam mempengaruhi suatu kebijakan tetapi terelibat juga suatu komponen didalam negeri seperti mencakup unsur power, kepentingan dan reaksi, politik internasional juga melingkupi perhatian terhadap sistem internasional dan perilaku para pembuat keputusan dalam konteks politik. Menurut Mark R. Amstutz dalam esensinya tentang kebijakan luar negeri adalah *explicit and of governmental officials designed to promote national interest beyond a country's territorial boundires*. (eksplisit dan pejabat pemerintah yang dirancang untuk memajukan kepentingan nasional di luar batas wilayah suatu negara) Dalam maknanya terdapat tiga fokus utama yaitu tindakan atau kebijakan pemerintah, pencapaian kepentingan nasional dan spektrum kebijakan luar negeri yang melewati batas kewilayahan negara. Oleh karena itu setiap kebijakan pemerintah yang berelasi dengan aktor negara lain secara definisi merupakan satuan dari kepentingan kebijakan luar negeri.

Politik bisa diartikan sebagai seperangkat pengambilan keputusan atau proses kebijakan luar negeri yang mempunyai fungsi politik tertentu untuk

negara, beberapa fungsi umum :

- a. Mempertahankan keamanan nasional dengan mengembangkan kapabilitas militer dan masuk ke aliansi keamanan dengan negara lain;
- b. Menangani dan meningkatkan kekuatan ekonomi nasional dan kesejahteraan dengan membuka pasar luar negeri untuk melakukan aktivitas ekspor dan investasi asing;

Tentu hal di atas sebagai pedoman untuk menindak sesuatu, yang bertujuan untuk meraih sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya yang pada akhirnya bermuara pada konsep pilihan dalam melahirkan sebuah kebijakan politik.

Politik Internasional dikaitkan dengan konsep kepentingan yang diartikan dalam batasan power. Konsep ini berkaitan antara akal yang berusaha memahami politik Internasional dan fakta-fakta untuk ditinjau dan difahami. Politik dalam esensinya adalah ruang otonom yang diyakini secara berbeda dari indikator-indikator seperti ekonomi, etika, estetika dan agama¹¹. Politik adalah alat keputusan yang menjadi pedoman untuk bertindak, atau seperangkat tindakan yang dirancang mencapai tujuan yang diinginkan. Pemahaman konsep ini diperlukan agar kita dapat membedakan politik luar Politik internasional dan domestik. Namun, tidak bisa dipungkiri Pembuatan kebijakan luar negeri selalu memperhatikan konsekuensi dari keberadaan negara. Kebijakan luar negeri adalah perumusan strategi atau rencana aksi Pengambil keputusan nasional yang berurusan dengan negara atau unit politik lain organisasi internasional lainnya, dan kontrol untuk mencapai tujuan nasional tertentu yang digariskan dalam istilah kepentingan nasional. Politik luar negeri yang ditempuh oleh suatu pemerintah memang untuk mewujudkan kepentingan nasional rakyat yang dibawah kepemimpinannya, meskipun kepentingan nasional suatu

¹¹ Vinsensio Dugis. Buku Teori Hubungan Internasional Perspektif -perspektif Klasik 2016. Hal 45.

negara pada waktu itu ditentukan oleh penguasa pada waktu itu. Negara dan aktor di negara-negara tersebut terlibat dalam berbagai jenis kerjasama, termasuk bilateral, trilateral, regional, dan multilateral, untuk mencapai kepentingan nasional.

Terlebih dengan melihat perkembangan zaman saat ini, bagaimana arah kebijakan suatu negara dapat berubah dalam kondisi tertentu, melihat adanya potensi ancaman yang datang, mereka (negara) akan mencoba memberi tekanan terhadap negara lain yang dianggap mengancam kedaulatannya dengan membangun aliansi atau sekutu. Terlebih jika melihat sisi geografis Uni Emirat Arab sangat dekat dengan Iran. Iran menjadi ancaman nyata untuk UEA, terlebih jika meninjau dari aspek diplomatik kedua negara Uni Emirat Arab dengan Iran sedang memiliki hubungan yang memanas, karena perebutan beberapa pulau di Selat Hormuz. Selat ini sangat strategis siapa saja yang mendapatkan akan diuntungkan secara ekonomi dan politik., meskipun berbeda sekte, pengaruh kepemimpinan kepala negara menjadikan indikator keputusan kebijakan luar negeri yang absolut. Karena hal itu UEA dan Israel mencoba menjalin kerjasama diberbagai bidang antara lain di sektor politik, keamanan dan ekonomi. Karena keduanya mempunyai kekhawatiran yang sama terhadap pengembangan program nuklir yang sedang dijalankan oleh Iran. Tidak sampai disitu kedua negara ini mengupayakan untuk melakukan lobbying ke forum internasional dengan melakukan cara-cara perundingan di Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) memastikan supaya menghentikan adanya produksi perkembangan senjata nuklir milik Iran. Namun PBB tidak mempermasalahkan dengan aktivitas tersebut, karena argumentasi Iran saat itu mereka hanya memproduksi Nuklir untuk industri dalam negeri yang berkaitan dengan perkembangan penelitian energi nuklir.

2. **Kepentingan Nasional**

Berbicara kepentingan nasional, pada dasarnya konsep ini merupakan sebuah terobosan yang dicetus oleh pakar hubungan internasional yang bermadzhab realisme. Para sarjana Hubungan internasional berpendapat bahwa konsep Keamanan adalah "konsep esensial", pendekatan tradisional yang diatur oleh aliran realisme mengatakan bahwa konsep Keamanan adalah negara yang bebas dari ancaman militer atau kemampuan suatu negara untuk melindungi negara atau rakyatnya dalam berbagai potensi serangan militer atau non militer yang berasal dari eksternal. Kepentingan nasional juga merupakan pondasi dasar yang menjadi alasan dan faktor utama dalam mengarahkan para pembuat kebijakan luar negeri suatu negara.

Merujuk pada konsep yang di kembangkan oleh pakar Hubungan Internasional Hans J. Morgenthau, Kepentingan nasional adalah kemampuan negara minimum, untuk memberi perlindungan dan pertahanan identitas fisik, politik dan budaya sebelum berpotensi adanya campur tangan dari negara lain. Para kepala negara membuat kebijakan khusus untuk negara-negara yang kooperatif atau terkena dampak konflik. Kepentingan nasional juga merupakan aspek bagian yang terdiri seperti ekonomi, ideologi, kekuatan dan keamanan militer moralitas dan legalitas. Hal itu diperjelas oleh Peter Chalk, sebuah fenomena global modern diwarnai dengan "grey phenomena" (fenomena permukaan abu-abu), Dalam artian, fenomena ini dapat didefinisikan sebagai "ancaman terhadap keamanan, stabilitas nasional dan internasional". yang dihasilkan dari proses interaktif antara negara dan aktor non- negara¹².

Maka dari itu seharusnya tiap negara pasti memiliki power dan kelebihan masing-masing, karena bagi masing-masing pemimpin negara berhak menggunakan kemampuannya agar tercapai pengaruhnya di dunia

¹² Prof. Anak Agung Banyu Perwita, Ph,D dalam Bukunya *Dinamika Keamanan Dalam Hubungan Internasional dan implikasinya bagi Indonesia*, 2008, hal 8

internasional agar dapat memenuhi kepentingan nasional. Terdapat beragam sumber power dan kemampuan negara menurut Robert J.Jakson, yaitu :

a. Ekonomi

Aspek ekonomi terbilang esensial pada suatu negara, karena semakin besar kapasitasnya untuk mengupgrade kapabilitas militer dan juga banyaknya sekutu yang berpotensi bisa dipengaruhi.

b. Geografi dan populasi

Bentuk dan letak suatu negara bisa mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Negara dengan bentuk lebar dan panjang seperti Amerika Serikat, China dan Rusia memiliki kelebihan terkait dengan angka populasi dan sumber daya alamnya, namun di aspek lain mereka juga harus mempertahankan teritori yang luas juga perbatasan yang panjang.

c. Sumber daya alam dan kemampuan IPTEK

Suplai energi amatlah berguna bagi suatu negara. Populasi yang besar serta sumber daya alam yang cukup dan kemampuan IPTEK yang mencukupi akan memudahkan dalam mengembangkan negara tersebut, dalam berbagai aspek terutama pada bidang militer, persenjataan dan nuklir.

d. Kemampuan Militeristik

Level, struktur serta alat militer merupakan indikator penting dalam menentukan kemampuan suatu negara meperhitungkan power yang dimilikinya.

e. Soft power

Respons, tindakan serta patronasi yang dilakukan suatu negara untuk menggapai kepentingan nasionalnya tanpa perlu adanya paksaan. Kemampuan ini seringkali terbangun dari antaksi budaya dan nilai-nilai serta kebijakan-kebijakan yang dianggap integral pada sesama

negara lainnya.

Kepentingan nasional dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu :

- a. Kepentingan inti/dasar/mendekati; 2. Kepentingan yang begitu tinggi nilainya sehingga suatu bangsa rela berperang untuk mencapainya. Perlindungan wilayahnya adalah contoh dari kepentingan inti/fundamental/vital ini.
- b. 2. Kepentingan sekunder; mencakup berbagai aspirasi yang ingin dicapai masing-masing negara, tetapi mereka tidak mau memulai perang ketika ada kemungkinan lain (seperti negosiasi). Makna kedua yang sama pentingnya dapat disebut kepentingan deskriptif. Dalam arti tertentu, kepentingan nasional dapat dilihat sebagai tujuan yang ingin dicapai melalui kepemimpinan dan perjuangannya yang gigih. Ketika kita berbicara tentang kepentingan nasional dalam pengertian deskriptif ini, kita bergerak melampaui ranah metafisika menuju ranah realitas

Hadirnya kepentingan nasional didorong oleh kebutuhan negara. Kepentingan ini ditinjau berdasarkan kondisi internal dan eksternal suatu negara, seperti kondisi politik, ekonomi, militer dan culture. Kepentingan ini akan berdampak dalam stabilitas politik internasional yang memungkinkan bisa mempengaruhi suatu bangsa untuk mendapatkan pengakuan dunia. Berdasarkan analisa pada studi ini maka diperlukan adanya sebuah kesepakatan dengan negara lain yang mempunyai kekuatan militer yang setara atau lebih dari negaranya untuk bekerjasama dalam mengangani konflik. Yaitu ancaman Iran dengan kesepakatan ini maka Uni Emirat Arab bisa membeli pasokan senjata dari Israel yang terbilang canggih. Hal ini dilakukan karena upaya untuk mencegah atau menyeimbangi kekuatan militer Iran.

3. Geopolitik

Istilah Geografi pertama kali digunakan oleh sarjana Yunani, Erastosthenes pada abad ketiga sebelum Masehi. “geografi” berasal dari bahasa Yunani: ge (bumi) dan graphe (deskripsi). Budiarto menjelaskan bahwa faktor-faktor dasar geografi merupakan : perbatasan strategis (strategis frontiers), daerah pengaruh (sphere of influence), dan desakan penduduk (population pressure) mempengaruhi politik. Hal itu diperkuat oleh teori Montesquieu, bahwa faktor-faktor geografi mempengaruhi konstelasi politik suatu negara¹³, mereka (negara) berlomba-lomba untuk mempromosikan kepentingan nasional mereka sehingga menggoyahkan dan mengubah tatanan yang ada dan memperbaiki dunia dalam persepsi mereka.

Geografi politik, dalam artinya adalah variasi konflik sumber daya dan cara dimana itu diselesaikan. Penggunaan kata geografi politik terjadi pada masa tahun 1750-an, saat filsuf Perancis, Turgot, membuat fakta geografis atas tanah dan pertanian dalam masalah permukiman dan di distribusikan hasil pengelolaan dalam pengaturan politik. Geografi politik diartikan sebagai konfigurasi segitiga, dimana pada satu sisi merupakan segitiga kekuasaan, politik, dan kebijakan. Kekuasaan adalah hal yang utama untuk menopang politik dan kebijakan, tanpa adanya kekuasaan maka tidak ada power (kekuatan) untuk menarik politik dan kebijakan.

Lalu politik sebagai legitimasi atas seluruh rangkaian proses yang didalamnya melibatkan pencapaian, menjalankan, dan menentang kekuasaan atas fungsi negara dalam pemilu, perang. Kebijakan merupakan hasil yang diharapkan setelah proses dari politik, hal-hal dimana kekuasaan memungkinkan seseorang untuk mencapainya, dan politik merupakan posisi yang dapat di eksekusi dalam mengeluarkan suatu kebijakan.

¹³ J. Priyono & P. Yusgiantoro. (2017). Dalam Bukunya Geopolitik, Geostrategi, Geoekonomi. 2017, Hal 4.

Geopolitik menjadi istilah yang sering digunakan oleh para penulis, pengamat, dan praktisi politik internasional, mereka menggunakannya untuk mendeskripsikan, menjelaskan, atau menganalisis masalah dan persoalan kebijakan luar negeri tertentu. Ini digunakan demikian sering sehingga mengabaikan fakta bahwa geopolitik adalah cara menganalisis hubungan internasional. Sejarahnya meliputi kosa kata umum, posisi kuat pada konsep yang terkadang saling kontradiktif, sistem pemikiran yang konsisten, dan kelompok ahli teori dan cendekiawan yang diakui. Hubungan antara geografi, geopolitik, dan geostrategi. Negara perlu mewujudkan proteksi geopolitik dalam kebijakan luar negeri atau geostrategi mereka. Ketika suatu negara gagal melakukan ini, kemajuan politik negara tersebut dan bahkan kelangsungan hidup politiknya terancam. Hanya negara-negara yang mengejar geostrategi yang mencerminkan geopolitik dapat memperoleh manfaat dan mampu mempertahankan keuntungan atas kekuatan relatifnya. Semua itu bergantung pada hubungan antara geografi, geopolitik, dan geostrategi.

Eskalasi hubungan Uni Emirat Arab dengan Iran bisa dikatakan tidak membaik karena adanya sejumlah konflik geopolitik. Diantaranya perebutan mengenai beberapa pulau di Teluk Persia, yaitu pulau Abu Musa, pulau Greater Tunb, dan pulau Lesser Tunb¹⁴. Sementara itu Iran dan Uni Emirat Arab mengklaim bersama terhadap pulau ini. Disisi lain pulau ini diperebutkan karena letaknya yang strategis. Ketiga pulau tersebut terletak dekat dengan Selat Hormuz, dimana kawasan ini merupakan jalur transportasi bagi 40% produksi minyak dunia. Dengan asumsi, ketiga pulau ini berperan sebagai pusat kendali lalu lintas maritim pasokan minyak

¹⁴ Sidiq Ahmadi. (2022). Normalisasi Hubungan Diplomati Uni Emirat Arab – Israel Analisis Rasionalitas Kebijakan Politik Luar Negeri Uni Emirat Arab. *Journal Pemikiran Politik Islam*, Vol 5, 2022, hal 8.

dunia. Oleh karena itu perebutan terhadap ketiga pulau tersebut dianggap menentukan keuntungan karena kemampuannya untuk mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi internasional. dilihat dari beberapa tahun terakhir, Iran telah meningkatkan kehadiran dan aktifitasnya di pulau itu dengan membuat pangkalan militer untuk menyerang kapal tanker UEA yang melewati rute ini.

Geopolitik menjadi isu mendasar di ruang lingkup Politik Internasional, refrensi tentang hubungan antara politik dan wilayah menjadi sebuah relasi penting karena membuat suatu kebijakan yang mementingkan kepentingan nasional negara tersebut. Siapapun yang mendapatkan pulau Abu Musa akan mendapatkan keuntungan secara ekonomi karena selat ini sangat strategis. Keadaan ini memaksa UEA membawa kasus ini dipersidangan dewan keamanan PBB. Uni Emirat Arab menilai Iran bersalah dalam menyelesaikan kasus sengketa ini, mengapa tidak membawa permasalahan ini ke Mahkamah Internasional tapi lebih menggunakan kekerasan militer untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi.

Dengan hal UEA merasa bahwa Iran tidak ingin mengajukan gugatan kasus pulau tersebut ke Mahkamah Internasional. Iran menguasai pulau Abu Musa, Little Tunb dan Great Tunb pada tahun 1971 ketika Inggris memberikan kemerdekaan ke wilayah Teluk Persia yang diduduki dan menarik pasukannya. Pulau Abu Musa, satu-satunya pulau yang berpenghuni dari ketiganya, ditempatkan di bawah pengelolaan bersama berdasarkan kesepakatan dengan Sharjah, yang sekarang menjadi bagian dari Uni Emirat Arab¹⁵. Pada beberapa kasus terlihat bagaimana Aktor negara yang mencerminkan sikap dan perilaku yang agresif pada tahun 2016 ketika Arab Saudi mengeksekusi Nimr al-Nimr, salah satu tokoh Syiah di Arab

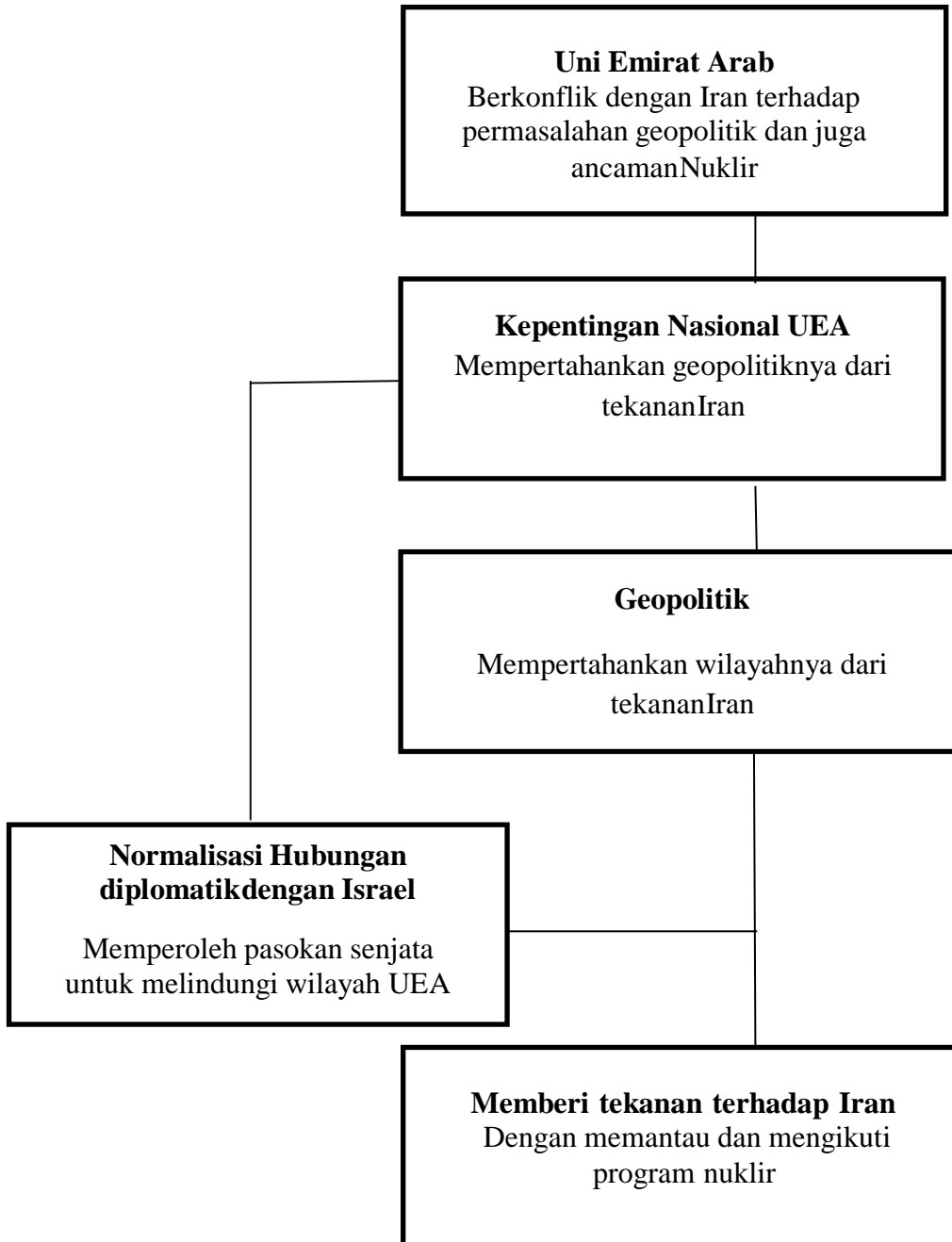
¹⁵Karta Raharja Ucu. 2012. UEA Ingin Selesaikan Perebutan Pulau dengan Iran.
<https://internasional.republika.co.id/berita/m2xy8t/uea-ingin-selesaikan-perebutan-pulau-dengan-iran>.

Saudi yang memperjuangkan kesetaraan Syiah pada massa Sunni. Iran menanggapi dengan menyerbu kantor Kedutaan Besar Arab Saudi di Teheran dan Konsulat Arab Saudi di Mashhad, Iran. Arab Saudi kemudian memandang bahwa Iran sebagai negara yang terus tidak menghormati hukum domestik yang berlaku dan melanggar peraturan internasional. Arab mencoba untuk mengasingkan Iran dari kawasan mereka. Langkah ini kemudian diikuti oleh beberapa negara koalisi, salah satunya itu adalah Uni Emirat Arab, yang kemudian menurunkan hubungan diplomatiknya dengan Iran¹⁶.

Iran dipandang menimbulkan masalah yang lebih kompleks terhadap kawasan regional, di Timur Tengah, Iran memiliki kemampuan untuk mendestabilisasi Iran dan Afhanistan, serta negara-negara di sekitar Israel. bahkan Iran menjadi negara yang mempunyai kekuatan untuk menentang status quo di Teluk Persia dan Timur Tengah. Program nuklir Iran yang di jalankan menjadi ancaman geopolitik pada masa mendatang bagi UEA karena jarak kedua negara tidaklah jauh. Setelah itu para pembuat kebijakan UEA sepakat untuk meningkatkan keamanan pertahanan dalam menanggapi “kebijakan agresif” Iran. UEA memandang Iran dan jaringannya membuat pasukan proksi di Yaman, Libanon dan Irak sebagai sesuatu ancaman yang besar di wilayah tersebut. sebagai respon, Abu Dhabi memperkuat aliansinya dengan US, Arab Saudi dan Mesir dengan melakukan latihan militer bersama dengan diwakili beberapa angkatan bersenjata seperti : Angkatan Laut dan Angkatan Udara di pangkalan udara Al Dhafra dan Pelabuhan Jebel Ali untuk memperkuat keamanan terotori.

¹⁶ Sidiq Ahmadi. (2022). Normalisasi Hubungan Diplomatik Uni Emirat Arab – Israel Analisis Rasionalitas Kebijakan Politik Luar Negri Uni Emirat Arab. *Journal Pemikiran Politik Islam*, Vol 5, 2022, hal 8.

B. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran